

REKONSTRUKSI NARASI: ORIENTALISME DAN OKSIDENTALISME DALAM KONTEKS KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA

¹Abdur Rahman

Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan, Indonesia,

: abdurrahman@uiidalwa.ac.id

²Miftahul Khoiri

Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan, Indonesia,

: techochoir@gmail.com

³Husnul Hotimah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia,

: husnulshi23@gmail.com

Abstract :

The Israeli-Palestinian conflict represents one of the protracted crises shaped by historical narratives and cultural biases rooted in Orientalism and Occidentalism. This study explores how these two frameworks influence global perspectives and create biased narratives related to the conflict. With a historical-critical approach, and using historical methods consisting of four stages, namely, heuristics, criticism, interpretation and historiography. This study analyzes primary sources, media representations, and policy documents to reveal the impact of these narratives on conflict resolution efforts. The findings show that Orientalism often legitimizes Israel's actions as a manifestation of Western modernity, while Occidentalism views Israel as a tool of Western imperialism. These conflicting views hinder the development of just and balanced solutions. This study also highlights the role of international institutions, such as the United Nations (UN), as well as the contribution of Indonesian diplomacy in supporting peace. This study contributes to the discourse on conflict resolution by offering a reconstruction of the narrative through equal and empathetic dialogue.

Keywords *Orientalism, Occidentalism, Israeli-Palestinian Conflict, International Relations*

Abstrak :

Konflik Israel-Palestina merepresentasikan salah satu krisis berkepanjangan yang dibentuk oleh narasi sejarah dan bias budaya yang berakar pada Orientalisme dan Oksidentalisme. Studi ini mengeksplorasi bagaimana kedua kerangka ini memengaruhi perspektif global dan menciptakan narasi bias terkait konflik tersebut. Dengan pendekatan historis-kritis, serta menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap yakni, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Penelitian ini menganalisis sumber primer, representasi media, dan dokumen kebijakan untuk mengungkap dampak narasi ini terhadap upaya resolusi konflik. Temuan menunjukkan bahwa Orientalisme sering melegitimasi tindakan Israel sebagai wujud modernitas Barat, sedangkan Oksidentalisme memandang Israel sebagai alat imperialisme Barat. Pandangan yang saling bertentangan ini menghambat pengembangan solusi yang adil dan seimbang. Studi ini juga menyoroti peran lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta kontribusi diplomasi Indonesia dalam mendukung perdamaian. Penelitian ini berkontribusi pada wacana resolusi konflik dengan menawarkan rekonstruksi narasi melalui dialog yang setara dan penuh empati.

Kata Kunci *Orientalisme, Oksidentalisme, Konflik Israel-Palestina, Hubungan Internasional*

How to cite :

Rahman, A., Khoiri, M., & Hotimah, H. (2025). Narrative Reconstruction: Orientalism and Occidentalism in the Context of the Israeli-Palestinian Conflict: Rekonstruksi Narasi: Orientalisme Dan Oksidentalisme Dalam Konteks Konflik Israel Dan Palestina. *Journal Islamic Studies*, 2(1), 1–13.

Doi:-

Article History

Masuk	Revisi	Diterima
19/3/2025	4/4/2025	23/4/2025

Pendahuluan

Konflik Israel-Palestina telah menjadi isu politik, sosial, dan budaya yang kompleks di dunia modern. Konflik ini bukan hanya sekadar perseteruan antara dua bangsa yang memperebutkan wilayah, melainkan juga mencerminkan dinamika kekuatan geopolitik antara

Timur dan Barat. Dinamika geopolitik antara Timur dan Barat melalui persaingan kekuatan ekonomi dan pengaruh politik, seperti Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, dan pergeseran kekuatan ekonomi dari Barat ke Timur dengan peningkatan ekonomi China (Fitriyanti, 2025). Sejak deklarasi pendirian Israel pada 1948, konflik ini telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan, termasuk pengusiran massal, kekerasan militer, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan akar sejarah yang panjang, konflik ini menjadi medan kontestasi narasi antara dua perspektif utama, yaitu Orientalisme dan Oksidentalisme (Aydın-Düzgüt, et al., 2022).

Orientalisme, sebagaimana dipopulerkan oleh Edward Said dalam bukunya *Orientalism*, adalah kerangka berpikir yang digunakan Barat untuk mendefinisikan Timur sebagai inferior, irasional, dan memerlukan bimbingan. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, narasi orientalis sering kali menggambarkan Israel sebagai perwakilan dari modernitas Barat, sementara Palestina diposisikan sebagai wilayah yang penuh kekacauan dan konflik tanpa arah. Representasi ini tidak hanya menciptakan stigma terhadap bangsa Palestina, tetapi juga memengaruhi cara dunia internasional, khususnya negara-negara Barat, memahami konflik ini (Christison, 2023). Sebaliknya, Oksidentalisme, meskipun kurang populer dibandingkan Orientalisme, menawarkan pandangan yang berlawanan. Oksidentalisme memandang Barat, termasuk Israel sebagai perwakilannya, sebagai entitas yang hegemonik, imperialistik, dan eksploitatif. Narasi ini berusaha mendekonstruksi hegemoni Barat dengan menonjolkan resistensi bangsa Palestina sebagai upaya melawan kolonialisme modern. Dalam perspektif oksidentalisme, dukungan Amerika Serikat terhadap Israel sering kali dilihat sebagai upaya melanggengkan dominasi geopolitik Barat di kawasan Timur Tengah (Bamberger, & Morris, 2024).

Sejarah konflik ini dapat ditelusuri kembali ke akhir abad ke-19, ketika gerakan Zionisme mulai berkembang di Eropa. Theodor Herzl, yang dianggap sebagai bapak Zionisme, mempromosikan ide pendirian negara bagi kaum Yahudi di Palestina sebagai solusi atas persekusi yang mereka alami di Eropa. Namun, ide ini menjadi masalah besar bagi penduduk asli Palestina, yang mayoritas adalah Muslim dan Kristen, karena berpotensi menggantikan mereka dari tanah air mereka sendiri. Pada tahun 1948, deklarasi pendirian negara Israel menjadi tonggak awal dari gelombang kekerasan dan pengusiran massal yang dikenal sebagai Nakba (bencana), di mana ratusan ribu warga Palestina dipaksa mengungsi (Aswir F Badjodah, et al., 2021). Konteks ini diperumit oleh keterlibatan kekuatan global seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang memberikan dukungan politik dan militer kepada Israel. Resolusi 181 Majelis Umum PBB pada 1947, yang membagi Palestina menjadi dua negara, dianggap tidak adil oleh komunitas Arab, karena memberikan sebagian besar wilayah kepada kaum Yahudi meskipun mereka adalah minoritas. Penolakan terhadap resolusi ini menjadi pemicu konflik bersenjata yang terus berlangsung hingga kini (Blank, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana narasi Orientalisme dan Oksidentalisme memengaruhi persepsi global terhadap konflik Israel-Palestina. Penelitian ini juga mengevaluasi peran PBB dan diplomasi Indonesia dalam mendukung solusi yang lebih adil dan seimbang. Dengan menggunakan pendekatan historis-kritis, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi pada wacana resolusi konflik dengan menawarkan rekonstruksi narasi yang lebih inklusif dan empatik. Dengan latar belakang ini, penting untuk menyoroti bahwa konflik Israel-Palestina bukan hanya tentang sengketa tanah atau agama, melainkan juga tentang bagaimana narasi budaya dan sejarah membentuk cara dunia memahami dan merespons krisis ini. Baik Orientalisme maupun Oksidentalisme memiliki kontribusi dalam memperumit upaya penyelesaian konflik. Oleh karena itu, rekonstruksi narasi melalui dialog lintas budaya yang setara menjadi langkah penting untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Dalam uraian deskripsi di atas tersebut, terdapat beberapa kajian terdahulu yang sekiranya dapat dibuat perbandingan yakni. Pertama, tulisan Mariani Amri terkait *Konstruksi Realitas Konflik Israel-Palestina Di Media Online Republika.Co.Id Dan Kompas.Com*, kajian ini lebih memfokuskan pada dua media yakni Kompas.com dan Republika.co.id yang cenderung memberikan dalih moral dengan menonjolkan Palestina dan Israel dalam penyelesaian konflik melalui hubungan diplomatik melalui konferensi

internasional serta berdasar kepada hukum internasional. Kedua, tulisan Djalu Pamungkas tentang Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Konflik Palestina Israel Dalam Menjaga Perdamaian. Kajian ini menitik beratkan pada Negara Indonesia dalam merespon atas agresi Israel ke Jalur Gaza pada tahun 2021 dengan mendesak Dewan keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata dalam menangani serangan yang terus-menerus dilakukan Israel dan Peran Indonesia dalam menjaga perdamaian Palestina-Israel dengan mendorong isu palestina di tingkat PBB. Salah satu cara yang dilakukan dengan mengadakan pembicaraan dengan negara Eropa khususnya Prancis untuk mengeluarkan Ultimatum kepada Israel untuk mewujudkan perdamaian dengan Palestina. Ketiga, tulisan Syahrul Adhim Dan Yuliati Yuliati terkait Konflik Terbentuknya Negara Israel Pada Tahun 1948-1973. Kajian ini lebih membahas terkait sejarah mengenai konflik berdirinya atau terbentuknya sebuah Negara Israel-Palestina. Juga konflik yang mengakibatkan sebuah peperangan dalam terbentuknya atau berdirinya Negara Israel di dalam sekitar lingkup wilayah negara-negara Arab termasuk wilayah Palestina. Dari ketiga kajian terdahulu di atas, semuanya tidak terkait dengan riset yang penulis lakukan. Karena riset yang penulis lakukan fokus kajiannya terkait Rekonstruksi Narasi: Orientalisme Dan Oksidentalisme Dalam Konteks Konflik Israel Dan Palestina, yang juga mengeksplorasi bagaimana kedua kerangka ini memengaruhi perspektif global dan menciptakan narasi bias terkait konflik tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kajian kualitatif dengan kajian studi kepustakaan serta pendekatan historis-kritis. Kajian kepustakaan akan digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Untuk itu, sebelum melangkah pada pembahasan perlu dilakukan pengumpulan data untuk memperoleh informasi terkait Rekonstruksi Narasi: Orientalisme Dan Oksidentalisme Dalam Konteks Konflik Israel Dan Palestina, dengan maksud tujuan menggagas ulang tulisan terkait Israel dan Palestina. Adapun beberapa data yang digunakan yaitu bersumber dari dokumen sejarah, buku, dan jurnal yang relevan dan membahas terkait topik yang diteliti yaitu Rekonstruksi Narasi: Orientalisme Dan Oksidentalisme Dalam Konteks Konflik Israel Dan Palestina.

Selain itu Kajian ini juga menggunakan metode penelitian sejarah dengan tahapan pertama heuristik dengan pengumpulan sumber-sumber dokumen primer yang penulis sebutkan di atas. Kemudian tahap kedua kritik, dengan melakukan screening data yang penulis dapatkan dengan memperhatikan dari data yang ada. Kemudian tahap ketiga interpretasi, dalam hal ini data yang sudah melalui kritik dianalisis menggunakan teknik analisis naratif dan wacana kritis. Prosesnya meliputi identifikasi pola narasi, perbandingan representasi Timur dan Barat, serta validasi temuan dengan literatur akademik.

Penelitian ini dirancang untuk memberikan analisis komprehensif dan nuansa tentang Orientalisme Dan Oksidentalisme Dalam Konteks Konflik Israel Dan Palestina sepanjang sejarah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi narasi Orientalisme Dan Oksidentalisme Dalam Konteks Konflik Israel Dan Palestina sepanjang sejarah.

Temuan dan Diskusi Hasil

Orientalisme berasal dari kata “orient”, berarti Timur, dalam bahasa Latin serta beberapa bahasa Barat lainnya. Istilah orientalisme mengacu kepada semua cabang ilmu yang concern dengan kajian-kajian bangsa Timur dalam semua aspeknya seperti agama, bahasa, ilmu, sastra, seni, dan lain-lain. Secara garis besar istilah tersebut dipakai untuk menyebut studi mengenai soal-soal ketimuran. Para peneliti mendapatkan kesulitan dalam menentukan siapa dan kapan awal mula orientalisme munculnya. Ada yang menyebut awal mula munculnya pada abad ke-11 Masehi (Carvajal Castro, 2020). Terdapat pendapat yang dianggap lebih akurat yang menyebutkan bahwa munculnya orientalisme pada abad ke-7 Hijriyah, ketika kaum sabbat Spanyol menyerang kaum muslimin. Ketika raja konstantinopel yakni Alfons memerintahkan kepada Michael Scott untuk melakukan penelitian terhadap disiplin ilmu yang ada kaum muslimin pada saat itu. Penelitian

dimulai dengan mengumpulkan beberapa pendeta guna menerjemahkan buku-buku bahasa Arab ke dalam bahasa Prancis. Orientalisme resmi diawali dengan terbitnya ketetapan majma' (konferensi) gereja Wina pada tahun 1312 Hijriyah dengan membentuk lembaga penelitian bahasa Arab di beberapa Universitas Eropa. Ahli sejarah sepakat bahwa permulaan orientalis secara resmi pada abad ke-13 Masehi (Minnema, 2020).

Akar gerakan orientalisme dapat ditelusuri dari kegiatan mengoleksi dan menterjemahkan teks-teks dalam khazanah intelektual Islam dari bahasa Arab ke bahasa Latin sejak Abad Pertengahan di Eropa. Kegiatan ini umumnya dipelopori oleh para teolog Kristen. Dari hasil koleksi itu Museum London dan Mingana Collection di Inggris adalah di antara pemilik koleksi manuskrip Islam terbesar di dunia. Selanjutnya, karena Orientalisme telah menjadi suatu tradisi pengkajian yang penting di dunia Barat, kini banyak sekali universitas di Barat yang mendirikan program Islamic, Middle Eastern, atau Religious Studies. Universitas London misalnya mendirikan SOAS (School of Oriental African Studies), Universitas McGill Canada, Universitas Leiden Belanda mendirikan Departement of Islamic Studies, Universitas Chicago, Universitas Edinburgh, University of Pennsylvania, Philadelphia dan lain-lain (Zaenab, 2022).

Orientalisme merupakan suatu cara pandang orang Barat terhadap bangsa selain Barat. Bangsa-bangsa selain Barat yang dimaksud yaitu bangsa-bangsa Timur Tengah dan Asia dilihat dengan kacamata rasial yang dianggap penuh *prasangka*. Bangsa Barat mencoba membantu membuat kajian tentang konsep-konsep kebudayaan, sejarah, dan juga agama-agama dan bangsa-bangsa Timur tentunya dengan metode dan pendekatan kajian ini khas Barat. Tulisan dalam artikel ini berupaya mendeskripsikan dan menelusuri serta telaah kritis terhadap beberapa pemikiran para orientalis dalam bidang studi tafsir dan hadis (Batchelor, 2021).

Konflik Israel-Palestina tetap menjadi isu yang kompleks, dengan dimensi sejarah, politik, dan kemanusiaan yang saling terkait. Perspektif Orientalisme dan Oksidentalisme memainkan peran signifikan dalam membentuk narasi global tentang konflik ini. Di sisi lain, badan internasional seperti PBB dan UNRWA menghadapi tantangan besar dalam memberikan perlindungan sipil dan bantuan kemanusiaan di tengah eskalasi konflik yang terus berlangsung (Ramadani, et al., 2024).

Orientalisme, sebagaimana dijelaskan oleh Edward Said dalam *Orientalism*, memainkan peran sentral dalam membentuk persepsi global tentang konflik Israel-Palestina. Edward Said mengemukakan bahwa Barat cenderung melihat Timur sebagai entitas yang inferior dan tidak rasional, yang memerlukan pengawasan dan bimbingan dari peradaban Barat. Dalam konteks konflik ini, Israel sering diposisikan sebagai perwakilan dari modernitas Barat, sementara Palestina digambarkan sebagai wilayah yang penuh kekacauan dan konflik tanpa solusi yang jelas (Huber, 2021). Contoh orientalisme yang cenderung melegitimasi tindakan Israel sebagai representasi modernitas Barat bisa dilihat dalam cara media, wacana politik, dan representasi budaya menggambarkan konflik Israel-Palestina. Edward Said, dalam bukunya *Orientalism*, mengkritik bagaimana Barat sering menggambarkan Timur (termasuk dunia Arab dan Islam) sebagai "yang lain" terbelakang, irasional, dan penuh kekacauan, sementara Barat digambarkan sebagai modern, rasional, dan progresif. Misalnya Media Barat menggambarkan Israel sebagai "oasis modern" di Timur Tengah, Penggambaran Palestina sebagai ancaman terhadap kemajuan, dan Wacana pembangunan dan teknologi (Skeen, 2023).

Media Barat memperkuat narasi ini dengan menggambarkan Israel sebagai "demokrasi satu-satunya" di Timur Tengah yang dikelilingi oleh ancaman dari dunia Arab. Sebaliknya, Palestina kerap direduksi menjadi simbol kekerasan atau korban, tanpa pengakuan terhadap perjuangan mereka untuk kemerdekaan. Representasi ini terlihat dalam berbagai liputan media, seperti laporan *The New York Times* yang sering kali menyoroti keamanan Israel tanpa memberikan perhatian yang proporsional terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh warga Palestina (Sholehkatun, et al., 2024).

Narasi orientalis ini juga tercermin dalam kebijakan internasional. Resolusi 181 yang membagi wilayah Palestina menjadi dua negara, meskipun legal secara internasional, dipandang bias karena memberikan proporsi wilayah yang lebih besar kepada Israel,

meskipun penduduk Yahudi saat itu adalah minoritas. Dukungan dari Amerika Serikat terhadap Israel semakin memperkuat dominasi narasi ini, menggeser fokus dari hak-hak Palestina menjadi isu stabilitas regional dalam kerangka kepentingan Barat.

Oksidentalisme dalam Konflik Israel-Palestina

Secara etimologis, *occident* berarti “arah matahari terbenam”. Kata ini berasal dari bahasa Latin *occident* dari kata *occido* atau *occedo*, dan *occidere*, yang berarti *to go down*. Istilah ini mengandung banyak arti seperti: turun, memukul, membunuh, menghancurkan-leburkan, jatuh, terbenam, senja, atau Barat (*the west*) atau bagian dunia sebelah Barat Asia, terutama Eropa dan Amerika. *Occidental* berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan *occident*/*western* atau Barat, seperti kebudayaannya, bangsanya, penduduknya, ide-idenya, pandangan hidupnya, tingkah lakunya, sudut pandang) ya dan lain sebagainya.

Sebagai antitesa *Orientalisme*, Hassan Hanafi dari Cairo University mencetuskan *Oksidentalisme* (*ilm al-Istigrab*), sebagai sebuah paradigma sekaligus kerangka ilmu. Jika *Orientalisme* ialah pandangan tentang “kita” (Islam dan Timur) melalui kacamata “mereka” (Barat), maka *Oksidentalisme* dimaksudkan untuk menguak ambiguitas sejarah “kita” (*Ego*) dan “mereka” (*Other*), serta pergulatan antara kelemahan “kita” dan keunggulan “mereka”.

Sebaliknya, *Oksidentalisme* menawarkan pandangan yang berlawanan, di mana Barat dipersepsikan sebagai kekuatan imperialistik yang mendominasi Timur Tengah. Dalam pandangan ini, Israel dianggap sebagai alat geopolitik Barat, khususnya Amerika Serikat, untuk memperluas hegemoni di kawasan tersebut yang mencakup pendekatan historis, geopolitik, dan perubahan sikap beberapa negara Arab terhadap Israel dalam kerangka imperialisme modern.

Narasi oksidental yang berkembang di Timur Tengah mengkonsolidasi pandangan bahwa Palestina adalah korban dari konspirasi Barat yang mendukung Zionisme, sementara rakyat Palestina dianggap sebagai pejuang yang melawan kekuatan kolonial. Sikap ini juga memperkuat retorika perlawanan terhadap Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya yang mendukung Israel, sehingga memperumit usaha-usaha perdamaian.

Kedua perspektif ini, baik *orientalis* maupun *oksidentalis*, tidak hanya mempengaruhi bagaimana konflik ini dipahami di tingkat internasional, tetapi juga bagaimana solusi dan resolusi damai dirumuskan. Narasi yang terbentuk dari kedua pandangan ini sering kali menghalangi terciptanya pendekatan yang adil dan seimbang dalam menangani masalah hak asasi manusia dan kedaulatan di Palestina (Amri, 2022).

Oksidentalisme mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyikapi peradaban Barat. Bukan persoalan menolak atau menerima, tetapi lebih kepada mengkritisi. Demi menuju kepada kesadaran pembebasan manusia seutuhnya. Bahwa di dunia ini semua manusia adalah sama dan semua peradaban adalah sama.

Semenjak penjajahan Barat baik melalui pemikiran dan kekuatan ideologi (*kapitalisme* dan *sosialisme*) yang menguasai kawasan Muslim, lambat-laun membangkitkan Timur-Islam dari tidur panjang sejarah peradaban. Modernitas telah menjadi realitas yang tidak bisa lagi ditolak kemunculannya, dan menjadi tantangan besar agama-agama dalam menjawabnya. Lalu, dalam dunia Muslim diperhadapkan pada dua masalah besar, yaitu melawan hegemoni Barat dan menumbuhkan tradisi pemikiran dengan pendekatan *ijtihad* dan *rasionalisme* dalam metode berfikir umat menuju peradaban Islam (Simanjaning, et al., 2023).

Dua masalah besar inilah yang banyak dibicarakan oleh beberapa tokoh Islam bagaimana mencari solusi agar stagnasi pemikiran Islam dapat dikonstruksi, mulai dari konsep dan tawaran metode menjadi perbincangan yang hangat, salah satunya Hasan Hanafi dengan *Oksidentalisme* dan Kiri Islam, sebuah metode yang digagas sebagai anti tesis dari *orientalisme*.

Peran PBB dalam Konflik Israel-Palestina

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memegang peran penting dalam upaya menyelesaikan konflik Israel-Palestina sejak awal. Salah satu langkah awalnya adalah Resolusi 181 (1947), yang mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara: Yahudi dan

Arab. Resolusi ini memberikan sekitar 55% wilayah kepada komunitas Yahudi, meskipun mereka merupakan minoritas di Palestina saat itu. Komunitas Arab menolak resolusi ini karena dianggap tidak adil, sementara komunitas Yahudi menyambutnya sebagai legitimasi internasional untuk pendirian negara Israel.

Resolusi lain yang signifikan adalah Resolusi 242 (1967), yang dikeluarkan setelah Perang Enam Hari. Resolusi ini menyerukan penarikan pasukan Israel dari wilayah pendudukan dan penghormatan terhadap hak setiap negara di kawasan untuk hidup damai. Resolusi 338 (1973) memperkuat Resolusi 242 dengan menuntut gencatan senjata segera selama Perang Yom Kippur. Namun, pelaksanaan resolusi-resolusi ini sering terhambat oleh veto Amerika Serikat dalam Dewan Keamanan PBB, yang secara konsisten mendukung Israel.

Pengakuan PBB terhadap Palestina sebagai *negara pengamat non-anggota* pada tahun 2012 menjadi langkah penting lainnya. Pengakuan ini memberikan Palestina akses lebih luas ke lembaga-lembaga internasional, meskipun tidak memberi mereka status negara berdaulat penuh. Namun, peran PBB dalam menyelesaikan konflik ini kerap dipertanyakan, karena kurangnya mekanisme untuk memaksa Israel mematuhi resolusi internasional (Dewantara, 2023). PBB dianggap gagal dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina karena berbagai alasan, termasuk adanya hak veto di Dewan Keamanan yang sering digunakan, hak veto Negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, khususnya Amerika Serikat, sering menggunakan hak veto untuk menolak resolusi yang mengkritik Israel. Hal ini membuat PBB tidak dapat mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional yang dilakukan oleh Israel. Ketidakmampuan PBB untuk mengimplementasikan resolusinya secara efektif, artinya Meskipun PBB telah mengeluarkan banyak resolusi terkait konflik Israel-Palestina, namun resolusi tersebut sering kali tidak diimplementasikan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpatuhan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik terhadap resolusi PBB, serta kurangnya dukungan dari negara-negara anggota. PBB juga dinilai kurang adil dalam menerapkan standar yang sama bagi semua negara anggota, dengan beberapa negara anggota tetap PBB yang sering mendukung Israel. PBB dianggap menerapkan standar ganda dalam menangani konflik Israel-Palestina, dengan lebih banyak perhatian diberikan pada kepentingan Israel daripada Palestina. Hal ini terlihat dari sikap PBB yang seringkali tidak mampu menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel, serta kurangnya tindakan yang diambil untuk melindungi warga Palestina. PBB seringkali kesulitan mencapai konsensus dalam menangani konflik Israel-Palestina, terutama karena perbedaan pendapat dan kepentingan yang sangat besar antara negara-negara anggota. Hal ini membuat PBB tidak dapat mengambil tindakan yang efektif untuk menyelesaikan konflik. (Jabir, dkk, 2024, p. 153)

Dampak Kebijakan PBB bagi Palestina

Keberadaan Palestina dalam masyarakat Internasional, dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu kedudukannya sebagai bangsa dan kedudukannya sebagai Negara. Dalam kedudukannya sebagai bangsa, Palestina sudah tidak ada masalah, karena sejak sebelum timbulnya konflik dengan Israel, Palestina sudah diakui sebagai bangsa, yang menempati wilayah Palestina dan pengakuan tersebut disahkan oleh PBB bahkan diperkuat oleh PBB, serta dianggap sebagai embrio sebuah Negara. Hal ini terbukti dengan diikutkannya Palestina dalam sidang-sidang PBB sebagai peninjau. Akan tetapi menyangkut keberadaannya sebagai Negara, Palestina menemui kendala, yaitu tidak sempurnanya unsur-unsur Negara yang dimiliki Palestina. Memang Palestina sudah memiliki penduduk yang tetap di wilayah tertentu, pemerintah maupun kemampuan untuk berhubungan dengan Negara lain, akan tetapi keempat unsur tersebut tidak dapat terintegrasi dengan sempurna. Meski keempat unsur tersebut tidak sempurna, tidak terlalu dipersoalkan oleh masyarakat internasional, karena tidak membahayakan perdamaian internasional. Selain itu di sadari hukum internasional senantiasa berkembang, sehingga tidak harus selalu berpegang pada teori yang sudah ada, Mengenai pengakuan Palestina sebagai Negara, terdapat empat sikap yang berbeda yakni.

Pertama, Secara tegas menolak: penolakan ini dilakukan oleh 3 negara, Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Masing-masing memiliki alasan yang berbeda. Amerika menolak

memberikan pengakuan dengan alasan proklamasi pembentukan Negara Palestina tidak sah, dikarenakan sidang Nasional Palestina ke-19 sebagai pembentuk Negara Palestina tersebut dianggap sebagai tindakan sepihak. Pihak Israel menolak dengan alasan tidak bersedia meninggalkan jalur Gaza, Tepi Barat, serta Jerusslaem, yang tidak termasuk dalam ketentuan resolusi PBB No. 181, yang digunakan oleh Palestina sebagai acuan. Adapun Iran menolak, bukan karena tidak menyetujui berdirinya Negara Palestina akan tetapi ia tidak menyetujui resolusi mengenai pembagian wilayah dengan Isarel dijadikan acuan Iran semata mata menginginkan Israel meninggalkan Palestina secara total.

Kedua, Negara yang mengakui dan mendukung terdiri dari Negara-negara sosialis, Timur Tengah, serta Negara lain yang semula simpati dengan Palestina, seperti Indonesia. Ketiga, Negara-negara blok barat, menyambut baik atas penerimaan Palestina terhadap resolusi tersebut, akan tetapi menolak mengakui Negara Palestina, karena dianggap tidak memenuhi unsur hukum internasional sebagai Negara. Keempat, Menerima putusan sidang Palestina tetapi menunda memberikan pengakuan terhadap Negara Palestina. Negara yang bersikap seperti ini adalah Jepang, Yunani dan Jerman Timur.

Kesepakatan Oslo I dan II secara umum memiliki arti yang penting bagi berdirinya Negara Palestina. Karena hasil dari kedua kesepakatan tersebut memberikan hak-hak otonom terhadap wilayah-wilayah di Palestina serta penarikan pasukan Israel yang khususnya berda di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Dengan demikian, masyarakat Palestina terbebas dari segala intimidasi yang dilakukan pasukan Isarel agar mereka keluar dari wilayah-wilayah yang telah mereka tinggali. Selain itu dengan ditandatangani kedua kesepakatan tersebut berhak menyatakan kemerdekaan Palestina di wilayah-wilayah yang telah disepakati dalam kesepakatan tersebut yaitu Tepi barat dan Jalur Gaza (Riyanti, & Nisa, 2024).

Dampak Kebijakan PBB bagi Israel

Dampak Kebijakan PBB bagi Israel tidak lepas dari kepentingan Amerika Serikat yang terus memberikan dukungan kepada Israel. Amerika Serikat sebagai Negara yang memiliki peranan dominan dalam tubuh PBB bahkan memiliki hak veto yang lebih banyak pro terhadap Israel. Disini erat kaitannya antara PBB dan Amerika Serikat sebagai Negara Adikuasa yang berperan penting bagi PBB. Adapun berbagai kebijakan Politik Luar Negeri AS yang mendukung Israel sebagai berikut.

Pertama, Tanggal 21 Februari 1983, Presiden Amerika, Ronald Reagan meminta kepada seluruh Negara-negara Arab agar menerima eksistensi Israel sesuai dengan realitas yang ada. Kedua, Tanggal 4 Desember 1983, Reagan menegaskan sikap negaranya yang akan terus membantu menjaga keamanan Israel dan melawan semua hal yang mengancam keamanannya. Ketiga, Tanggal 15 Mei 1985, Menlu AS menegaskan bahwa Washington akan terus menghalangi usaha sebagian kalangan untuk membentuk Negara Palestina merdeka. Keempat, Tanggal 30 September 1985, Reagan menyetujui aksi militer Israel terhadap rumah kediaman ketua PLO di Tunisia sebagai bagian melindungi diri dari aksi teroris. Kelima, Tanggal 18 Februari 1986, AS menolak permintaan ketua PLO agar AS mengakui hak bagi rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri. Keenam, Tanggal 16 Februari 1988, Jujur Gedung Putih menyatakan bahwa politik Amerika tetap pada persepsi lamanya tentang hakikat perdamaian di Timur Tengah yaitu semua rakyat Palestina dan bangsa Arab dan muslim agar melepaskan tanah Palestina kepada Israel, kalau itu terpenuhi, maka berarti perdamaian di kawasan itu akan cepat terwujud. Ketujuh, Tanggal 1 Maret 1988, salah satu organisasi Amerika di bawah PBB meminta agar menghapus keanggotaan PLO dan kantornya di PBB. Mereka juga menuntut agar menyeret seluruh anggota PLO ke pengadilan internasional. Kedelapan, Tanggal 10 Maret 1988, Pemerintah Amerika secara sepihak menutup kantor perwakilan PLO di PBB yang mereka berlakukan sejak tanggal 21 Maret 1988. Keputusan itu tanpa memperhatikan semua kesepakatan internasional (Ma'arif, & Widadt, 2023).

Selain itu masih terdapat lagi yang kesembilan di tanggal 17 Mei 1988, Reagan dan Menlu AS George Solutes menegaskan bahwa solusi terakhir dari konflik di Palestina terletak pada keseriusan bangsa Arab untuk melepaskan tanah Palestina untuk bangsa Yahudi. Kesepuluh, tanggal 27 Juli 1988, Konggres Amerika menyetujui keputusan pemerintah untuk memindahkan kedutaan Besar AS dari Kota TelAviv ke Al-Quds (Yerusalem). Kesebelas,

tanggal 15 November 1988, Departemen Luar Negeri Amerika mengumumkan bahwa Amerika tidak setuju dengan usulan pembentukan Negara Palestina Merdeka, karena hal itu berarti mengakui kepastian masa depan wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Padahal kedua wilayah itu masih ada dalam persengketaan antara Israel dan Palestina yang baru bisa diselesaikan dalam meja perundingan. Keduabelas, tanggal 25 November 1988, Amerika melarang pemimpin PLO yang mereka akui sebagai Presiden Palestina untuk masuk ke Amerika guna memberikan sambutan dalam sidang umum DK PBB. Tanggal 30 November 1988, mayoritas anggota DK PBB dengan suara voting 151 suara mengakui resolusi tentang pengakuan hak bagi Pemimpin PLO Yaser Arafat untuk berpartisipasi dalam pertemuan anggota DK PBB. Tetapi Amerika dan Israel menolak resolusi itu dengan alasan karena Yaser Arafat tidak mendapatkan visa dari pihak keimigrasian Amerika (Adhim, & Yulianti, 2021).

Peran UNRWA dalam Konflik Israel-Palestina

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) didirikan pada tahun 1949 untuk mengatasi krisis pengungsi Palestina yang timbul setelah peristiwa Nakba pada tahun 1948. Nakba mengakibatkan lebih dari 700.000 warga Palestina diusir dari tanah mereka dan menjadi pengungsi di negara-negara tetangga seperti Lebanon, Yordania, dan Suriah.

UNRWA telah menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial bagi lebih dari 5 juta pengungsi Palestina. Program pendidikan UNRWA, misalnya, mencakup lebih dari 700 sekolah di Jalur Gaza, Tepi Barat, dan negara-negara tetangga, dengan lebih dari 500.000 siswa yang terdaftar. Selain itu, program kesehatan UNRWA memberikan layanan primer yang sangat penting, terutama di wilayah yang terkena dampak blokade seperti Jalur Gaza.

Namun, UNRWA sering menghadapi kritik, termasuk tuduhan bahwa lembaga ini memperpanjang status pengungsi Palestina daripada menawarkan solusi permanen. Kritikus juga menyoroti keterbatasan dana yang dihadapi UNRWA, yang mengancam keberlanjutan program-programnya. Meskipun demikian, peran UNRWA tetap vital dalam meredakan krisis kemanusiaan di wilayah-wilayah yang terkena dampak paling parah, seperti Jalur Gaza yang mengalami blokade berkepanjangan oleh Israel (Khalidi, 2020).

Peran Diplomasi Indonesia dalam Konflik Israel-Palestina

Indonesia selalu memainkan peran aktif dalam mendukung perjuangan Palestina melalui jalur diplomasi internasional. Sebagai salah satu negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia sejak awal kemerdekaan secara tegas menyatakan sikapnya menolak pendudukan Israel atas tanah Palestina. Sikap ini sejalan dengan amanat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Indonesia mendukung solusi dua negara (two-state solution), di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan sebagai dua negara yang berdaulat. Di berbagai forum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan Gerakan Non-Blok, Indonesia terus menyuarakan hak-hak Palestina dan menyerukan agar komunitas internasional memberi tekanan lebih kepada Israel untuk menghentikan penjajahannya (Pamungkas, 2021).

Indonesia selalu terdepan dalam membela hak-hak kemanusiaan warga Palestina. Posisi Indonesia dalam konflik Israel-Palestina memiliki posisi yang strategis dalam menengahi konflik yang terus memanas antara Israel dan Palestina. Selain dikarenakan sama-sama sebagai penganut agama Islam, cita-cita mulia Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang akan selalu mendukung dan membantu menyokong kemerdekaan sebuah bangsa yang tertindas selama ini. Selain itu, diplomasi Indonesia sendiri merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk memperkuat dan mempertahankan komunikasi dengan Negara-negara berkembang.

Hubungan Indonesia dan Timur Tengah ditandai dengan hubungan pendidikan. Sejak masa sebelum kemerdekaan, banyak pemuda Indonesia yang berangkat ke Timur Tengah, baik Mesir maupun Arab untuk melakukan pencarian ilmu kepada Ulama-ulama di sana. KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan merupakan dua tokoh yang menimba ilmu ke sana

dan kemudian keduanya menjadi sosok yang dihormati dan disegani di kalangan masyarakat Indonesia.

Sejarah mengatakan bahwa hubungan erat Indonesia dan Palestina sudah terjalin semenjak sebelum kemerdekaan. Hal ini ditandai oleh beberapa kaum muda yang belajar ke Timur Tengah dan bertemu dengan syaikh-syaikh dari Palestina, yaitu seperti Kahar Mudzakkir yang belajar ke Mesir dan bertemu dengan Sayyid Amin al Husaini. Syaikh inilah yang memberikan respon baik dengan memberikan ucapan selamat kepada bangsa Indonesia ketika ia mendengar kabar kemerdekaan Indonesia. Palestina dan Mesir merupakan dua negara pertama yang mengakui kemerdekaan Negara Indonesia. Pada saat itu, Indonesia sangat membutuhkan sebuah pengakuan demi langgengnya sebuah negara. Dari sinilah Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaannya dengan berbagai perjuangan dan pengorbanan (Mahardi, 2021).

Dengan menganut politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia menempatkan diri sebagai bangsa yang menolak sebuah penjajahan dan penindasan atas rakyat palestina. Berbagai upaya perjuangan hak-hak rakyat Palestina telah banyak dilakukan oleh pemerintah Indonesia di arena internasional yaitu PBB.

Pada saat Indonesia memiliki status anggota tidak tetap DK PBB (2007-2008), Indonesia selalu berupaya dalam memperjuangkan perlindungan dan penjaminan hak-hak rakyat Palestina melalui badan perdamaian dunia, PBB. Dalam ranah PBB Indonesia memiliki peran aktif dalam memprioritaskan konflik Israel-Palestina. Sebagai anggota Dewan HAM, Indonesia mendorong diselenggarakannya sebuah Special Session Dewan HAM yang dilaksanakan pada 9 Januari dan 12 Januari 2009. Indonesia pernah menjadi salah satu Negara penggagas utama Sidang Khusus Majelis Umum PBB pada tanggal 15-16 Januari 2009 yang berbicara tentang isu Palestina (Simanjanrang, et al., 2023).

Pada 29 November 2012, Negara Palestina secara sah diperhitungkan sebagai non-member observer state PBB melalui co-sponsor dari Indonesia. Ketika Konferensi Asia-Afrika diselenggarakan di Indonesia, KAA ini menghasilkan sebuah deklarasi dukungan untuk Palestina. Deklarasi tersebut disebut dengan Declaration on Palestine. Selanjutnya, Indonesia menjadi Negara co-sponsor juga dalam sebuah moment penting bagi Negara Palestina, yaitu dalam upacara histori penaikan bendera Palestina di Markas Besar PBB di New York tepatnya pada tanggal 30 September 2015. Pada 14-15 Desember 2015, Indonesia menjadi tuan rumah International Conference on the Question of Jerusalem yang diselenggarakan bersama dengan OKI dan United Nations Committee on the Inalienable Rights of the Palestinian People.

Dalam membangun komunikasi dengan Israel, Indonesia memilih untuk tidak membuka jalur diplomasi dengan Israel. Isu pembukaan jalur diplomasi Indonesia-Israel sempat mencuat tatkala Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto melalui tokoh NU saat itu, Abdurrahman Wahid. Namun, isu tersebut tidak pernah terjadi sampai saat ini. Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai pengecam segala bentuk penjajahan tidak akan membuka jalur diplomasi dengan Israel sebelum mereka rela mengakui keberadaan Negara Palestina yang merdeka berdaulat, karena Indonesia sendiri merupakan salah satu Negara yang mendukung two state solution.

Indonesia mengambil langkah cepat dalam merespon sebuah pernyataan kontroversial dari seorang Presiden Amerika, Donald Trump. Presiden Jokowi menugaskan Menteri Luar Negerinya untuk segera meluncur ke Yordania, Lebanon, Eropa dan Turki. Indonesia langsung mengutuk pernyataan sepihak Donald Trump yang menghambat sebuah cita-cita perdamaian dua Negara. Tidak hanya menteri luar negeri, Presiden Joko Widodo juga ikut serta dalam sebuah konferensi luar biasa OKI di Istanbul, Turki.

Peran diplomatik dalam konflik Israel-Palestina ini tidak hanya dilakukan oleh aktor pemerintahan saja (Bashir, 2024). Namun, di Indonesia, gelombang protes langsung bermunculan dan aksi-aksi solidaritas Palestina guna mengecam pernyataan Trump terkait Yerusalem. Aksi-aksi yang dilakukan oleh rakyat Indonesia merupakan bentuk dukungan moral bangsa Indonesia atas penderitaan yang menimpa rakyat Palestina.

Rabu, 13 Juni 2018, seorang tokoh organisasi Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Tsquf, memberikan sebuah kuliah umum yang diselenggarakan oleh Trumane Institute. Selain itu,

ia juga didaulat menjadi pembicara dalam forum American Jewish Committee (AJC) Global Forum. Dalam pidatonya, ia menyatakan bahwa kehadirannya di sana adalah untuk Palestina. Selain itu, ia menyatakan bahwa kehadirannya di sana bukanlah sebagai wakil negara atau Nahdlatul Ulama, melainkan sebagai inisiatif pribadi. Ia menyadari akan reaksi masyarakat dunia dengan langkahnya tersebut. Langkah ini dianggap kontroversial karena dianggap telah mencederai perjuangan rakyat palestina dalam mendapatkan kemerdekaan. Tidak sedikit pihak yang mengecam langkahnya tersebut.

Indonesia menyatakan posisinya dalam menyikapi kebijakan Amerika yang mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel dan pemindahan kedutaan AS ke Jerusalem dengan mengecam keras kebijakan tersebut. Indonesia menilai langkah ini sebagai bentuk pelanggaran resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB dan bisa mengancam proses perdamaian. Indonesia mengajak negara-negara anggota PBB untuk tidak mengikuti langkah kebijakan Amerika Serikat. Pemerintah dan rakyat Indonesia selalu bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya.

Pembangunan pemukiman-pemukiman Yahudi oleh pemerintah Israel mendapat sorotan dari Pemerintah Indonesia (Tari, 2021). Secara aktif Indonesia menegaskan bahwa langkah tersebut adalah langkah ilegal. Di hadapan anggota Dewan Keamanan PBB, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menyatakan bahwa langkah pembangunan pemukiman ilegal di wilayah palestina termasuk di Yerusalem timur akan semakin memudahkan harapan solusi dua negara. Pembangunan ini merupakan sumber dari berbagai pelanggaran hukum dan HAM terhadap rakyat Palestina. Selanjutnya, Menlu menyatakan bahwa masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk menghentikan kebijakan pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel.

Beberapa bentuk dukungan konkret Indonesia untuk Palestina adalah penguatan dukungan negara-negara Asia-Afrika untuk kapasitas Palestina melalui peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA). Indonesia juga menjadi tuan rumah International Conference on the Question of Jerusalem sebagai kerja sama antara OKI dan United Nations Committee on Inalienable Rights of the Palestinian People. Pada 6-7 Maret 2016, Indonesia menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa OKI yang ke-5 yang membahas tentang isu Palestina dan Al-Quds Ash-Sharif, pertemuan ini adalah bentuk pengembangan penyelesaian konflik Israel-Palestina yang tak kian selesai.

Bantuan lain yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia adalah pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi 1.257 warga Palestina, pemberian pelatihan di bidang infrastruktur, teknologi, informasi, pariwisata, light manufacturing dan pertanian senilai USD 1,5 juta, bantuan untuk pembangunan Indonesian Cardiac Center di rumah sakit As-Shifa di Gaza. Bahkan Indonesia aktif memberikan kontribusi untuk UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) dalam kurun waktu 2009-2014 (Saepuloh, et al., 2024).

Melalui kementerian Luar Negeri, Indonesia menyatakan bagaimana posisinya dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, yaitu. Pertama, Mendukung solusi dua negara (Israel dan Palestina), berdasarkan hukum internasional dan HAM, dan agar kedua belah pihak mematuhi parameter yang telah dibentuk dalam sejumlah resolusi PBB. Kedua, Menekankan perlunya sikap berimbang (imparsial) dari masyarakat internasional dalam membantu penyelesaian masalah Palestina dan mendorong proses perdamaian. Ketiga, Mendukung pentingnya menjaga keberlangsungan kerja UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) untuk memberikan pelayanan kepada para pengungsi Palestina, serta ikut menyerukan perlunya keterlibatan masyarakat internasional dalam membantu para pengungsi Palestina, terutama dalam menjamin masa depan anak-anak. Keempat, Indonesia secara konsisten menyampaikan komitmennya untuk membantu penyelesaian konflik yang berkepanjangan antara Palestina dan Israel (Pratama, et al., 2024).

Kesimpulan

Konflik Israel-Palestina merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat dipahami hanya dari perspektif geografis atau etnis semata. Penelitian ini mengungkapkan bahwa narasi

Orientalisme dan Oksidentalisme memainkan peran signifikan dalam membentuk persepsi global tentang konflik tersebut.

Temuan utama dalam penelitian ini menyangkut beberapa hal yakni, pertama, Orientalisme cenderung melegitimasi tindakan Israel sebagai representasi modernitas Barat, sementara Palestina digambarkan sebagai wilayah yang tidak rasional dan penuh konflik. Kedua, Oksidentalisme memandang Israel sebagai instrumen imperialisme Barat di Timur Tengah, yang bertujuan mengendalikan geopolitik kawasan. Ketiga, Lembaga internasional seperti PBB dan UNRWA memiliki peran penting namun terbatas dalam menyelesaikan konflik, terutama karena hambatan politis dan keterbatasan mekanisme penegakan resolusi. Keempat, Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, konsisten mendukung perjuangan Palestina melalui diplomasi internasional dan memperjuangkan solusi dua negara. Rekonstruksi narasi melalui dialog lintas budaya yang setara dan empati menjadi kunci untuk mencapai perdamaian berkelanjutan di wilayah tersebut.

Langkah kongkrit yang harus dilakukan rekonstruksi narasi dalam konflik Israel-Palestina dapat mencakup pertama, melalui dialog Antar-Komunitas. Dalam hal ini Mendorong dialog langsung antara masyarakat sipil dari kedua belah pihak, termasuk pemuda, perempuan, dan kelompok agama, untuk berbagi pengalaman dan perspektif mereka. Kedua, melalui pendidikan untuk Perdamaian, dalam artian mengintegrasikan kurikulum yang mengajarkan toleransi, sejarah yang berimbang, dan keterampilan resolusi konflik di sekolah-sekolah di wilayah konflik. Program ini dapat melibatkan guru, siswa, dan orang tua dalam upaya bersama untuk membangun pemahaman yang lebih baik. Ketiga, melalui media yang berimbang dan kritis, yang bermaksud mendukung media independen dan jurnalis yang berkomitmen untuk menyajikan berita secara objektif dan berimbang. Kampanye literasi media juga penting untuk membantu masyarakat membedakan antara informasi yang valid dan propaganda. Keempat, Inisiatif Rekonsiliasi Sosial, dengan cara mendirikan pusat rekonsiliasi yang menyediakan ruang bagi individu dari kedua belah pihak untuk berbicara tentang pengalaman mereka, mengakui penderitaan bersama, dan mencari jalan menuju pemulihan. Kelima, mengadakan dukungan Internasional yang Konstruktif, dengan negara-negara dan organisasi internasional dapat memainkan peran penting untuk menyediakan platform guna berdialog, mendukung proses rekonstruksi narasi, dan memastikan bahwa upaya perdamaian didasarkan pada keadilan dan kesetaraan.

Referensi

- Adhim, S., & Yulianti, Y. (2021). Konflik Terbentuknya Negara Israel pada Tahun 1948-1973. *ASANKA: Journal of Social Science And Education*, 2(1), 61-70. <https://doi.org/10.21154/asanka.v2i1.2429>
- Amri, M. (2022). Konstruksi Realitas Konflik Israel-Palestina Di Media Online Republika.Co.Id Dan Kompas.Com. *Layar: Jurnal Ilmiah Seni Media Rekam*, 8(1), 31-48
- Aswir F Badjodah, Mahmud Husen, & Saiful Ahmad. (2021). Dinamika Konflik Dan Upaya Konsensus Palestina-Israel (Studi Kasus Perjanjian Perdamaian Oslo (Oslo Agreement) Tahun 1993). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(3), 409-420. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i3.619>
- Aydın-Düzgıt, S., Rumelili, B., & Topal, A. E. (2022). Challenging anti-Western historical myths in populist discourse: re-visiting Ottoman Empire-Europe interaction during the 19th century. *European Journal of International Relations*, 28(3), 513-537. <https://doi.org/10.1177/13540661221095945>
- Bamberger, A., & Morris, P. (2024). Critical perspectives on internationalization in higher education: commercialization, global citizenship, or postcolonial imperialism?. *Critical Studies in Education*, 65(2), 128-146. <https://doi.org/10.1080/17508487.2023.2233572>
- Bashir, Y. I. (2024). The Role of Diplomacy in Conflict Resolution: A Case Study of the Palestine-Israeli Conflict. *THE PROGRESS: A Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(4), 14-24. <https://doi.org/10.71016/tp/4j8s4937>

- Batchelor, S. (2021). *The awakening of the West: The encounter of Buddhism and Western culture*. Echo Point Books & Media, LLC.
- batubara, mardiyah. (2022). Orientalisme Dan Oksidentalisme: Kajian Keotentikan Al-Qur'an. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 5(2), 205-225. <https://doi.org/10.35132/albayan.v5i2.200>
- Blank, L. R. (2020). Irreconcilable Differences: The Thresholds for Armed Attack and International Armed Conflict. *Notre Dame L. Rev.*, 96, 249.
- Carvajal Castro, Á. (2020). Collective action and local leaderships in early medieval North-Western Iberia. Ninth-Eleventh centuries. <https://doi.org/10.1484/M.HAMA-EB.5.118455>
- Christison, K. (2023). *Perceptions of Palestine: their influence on US Middle East policy*. Univ of California Press. <https://doi.org/10.2307/jj.2711691>
- Dewantara, J. A. (2023). Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 19-25.
- Fitriyanti, S. (2025). Dampak Konflik Israel Pada Hubungan Internasional Di Timur. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(7), 1085-1094.
- Huber, D. (2021). *The International Dimension of the Israel-Palestinian Conflict: A Post-Eurocentric Approach*. State University of New York Press. <https://doi.org/10.1515/9781438481609>
- Jabir, N. I., Al Faruqi, M. D. A., & Paramitha, D. I. (2024). Kegagalan Implementasi Responsibility To Protect (R2P) Dalam Konflik Israel–Palestina. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 9545-9560.
- Khalidi, R. (2020). *The Hundred Years' War on Palestine*. Metropolitan Books.
- Ma'arif, M. S., & Widadt, W. (2023). Analisis Makna Denotatif dan Konotatif Berita Konflik Palestina dan Israel dalam Kabar Berita Harian Kompas. com Edisi Mei 2021. *Jurnal PENEROKA: Kajian Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 3(1), 14-30. <https://doi.org/10.30739/peneroka.v3i1.1923>
- Mahardi, D. P. (2021). Persepsi Pemuda Islam Terhadap Kebijakan Erdogan Pada Konflik Palestina-Israel. *Jurnal Penelitian Sosial Ilmu Komunikasi*, 5(2), 107-117. <https://doi.org/10.33751/jpsik.v5i2.4434>
- Minnema, L. (2020). Different Types of Orientalism and Corresponding Views of Jews and Judaism: A Historical Overview of Shifting Perceptions and Stereotypes. *Antisemitism Studies*, 4(2), 270-325. <https://doi.org/10.2979/antistud.4.2.04>
- Nabilah, N., & Wijayanti, R. (2022). Kekejaman Israel Terhadap Rakyat Palestina: Telaah Berita-Berita CNN Indonesia Tahun 2019-2021. *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(1), 58-80. <https://doi.org/10.18860/dsjpips.v1i1.1039>
- Pamungkas, D. (2021). Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Konflik Palestina Israel Dalam Menjaga Perdamaian. *Jurnal Serambi Hukum*, 14(02), 63-70.
- Pratama, Y., Suryasuciramadhan, A., Saputra, I. B., & Pamungkas, D. S. (2024). Analisis Opini Publik Terhadap Konflik Palestina dan Israel. *Journal Innovation In Education*, 2(2), 238-244. <https://doi.org/10.59841/inoved.v2i2.1276>
- Prawira, I., & Irawan, R. E. (2021). Objektivitas Tiga Media Siber Indonesia: Studi Konten Berita Konflik Israel-Palestina. *Jurnal Wacana Politik*, 6(2). <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i2.35073>
- Ramadani, M. S., Kurniawan, K., & Fuadin, A. (2024). Menguak Bias Media dalam Pemberitaan Konflik Israel-Palestina: Sebuah Analisis Konten Kritis. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 10(1), 887-905. <https://doi.org/10.30605/onoma.v10i1.3392>
- Riyanti, D., & Nisa, F. L. (2024). Dampak aksi boikot produk berafiliasi Israel terhadap pertumbuhan produk lokal di era konflik Israel-Palestina. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 3(2), 1-13. <https://doi.org/10.14710/djieb.21613>
- Saepuloh, S., Razanah, M. F., Fajari, R. D., Aripin, R. R., & Faqihuddin, A. (2024). Pandangan mahasiswa terhadap genosida Israel di Palestina. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(3).

- Sholehkatina, B. D., Winarta, L. A. P., Wijayanti, P., & Rahayu, R. C. (2024). Analisis Peran Media Sosial Dalam Konflik Israel-Palestina Ditinjau Dari Teori Orientalisme Edward W Said. *HUMANIS: Human Resources Management and Business Journal*, 1(1), 31-39. <https://doi.org/10.33830/humanis.v1i1.6962>
- Simanjorang, B. M., SyahPutra, B. A., Husin, M. H., Bangun, I. B., Zawani, N., Siburian, T. D. N., & Perangin-Angin, Z. G. (2023). Pengaruh Konflik Palestina dengan Israel terhadap Gerakan Perlawanan Hamas dan Dampaknya Bagi Indonesia. *Mediation: Journal of Law*, 24-30.
- Skeen, G. (2023). *Deeps Where the Elephant May Swim: An African Odyssey Through 50 Key Bible Verses*. Wipf and Stock Publishers.
- Tari, D. Z. A. (2021). Dinamika Gerakan Anti-Globalisasi Tahun 1994-2021: Studi Kasus: Analisis Boikot Produk Prancis Oleh Muslim Sebagai Bagian Dari Global Justice Movement Dengan Perspektif Teori Gerakan Sosial.
- Zaenab, C. (2022). *Bantahan Terhadap Argumentasi Orientalis: Textual Criticism Of The Quran (Studi Kritis Tentang Tuduhan Kesalahan Penyalinan)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).